

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu topik yang menarik didiskusikan pada banyak forum, resmi maupun tidak, mulai dari implementasi kebijakan terkait kesejahteraan sosial, sumber daya manusia kesejahteraan sosial, lembaga/organisasi kesejahteraan sosial, sampai dengan hasil pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan isu potongan melintang (*cross cutting issue*) yang berkaitan dengan banyak hal, termasuk sebagai tujuan utama didirikannya suatu negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Prostitusi kini bukan menjadi hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Kompleksitas masalah prostitusi semakin menjadi, dengan pesatnya perkembangan kecanggihan teknologi, baik secara bentuk maupun tingkatannya. Mayoritas para pekerja di tempat prostitusi adalah wanita, atau yang lebih dikenal dengan istilah wanita tuna susila (WTS). Wanita Tuna Susila merupakan salah satu tuna sosial, yang masuk dalam kategori masalah sosial karena perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma atau nilai di masyarakat.

Berdasarkan data dari Direktorat Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Direktorat TS & KPO) tahun 2019, populasinya kini mencapai 1.1 juta jiwa. Di Sulawesi Selatan, tercatat ada sekitar 56.000 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial,

Wanita Tuna Susila, dan atau korban perdagangan orang. Meningkatnya jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dari tahun ke tahun, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, kemalasan, dan kurangnya keahlian. Permasalahan mengenai wanita tuna susila harus ditangani secara serius, karena dampak dari permasalahan tersebut berakibat pada munculnya berbagai tindak kriminal, dan penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS.

Permasalahan ini menjadi sebuah peringatan (*warning*) bagi kita semua, bahwa permasalahan sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bukan lagi sebagai *secondary problem*, melainkan sudah masuk dalam kategori *main problem* dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari Intelresos Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang dilakukan, 249 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) baru menjangkau 12.388 penerima manfaat. Artinya baru 1.12% Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menerima layanan rehabilitasi sosial di dalam panti.

Minimnya jumlah penerima manfaat Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, perlu direspon melalui sebuah sistem manajemen lembaga kesejahteraan sosial yang terstruktur dan didukung oleh inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan agar lahir peningkatan pelayanan secara signifikan, yang dapat menurunkan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya wanita tuna susila.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah memberikan pembinaan dan pelayanan di dalam panti, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar sebagai unsur pelayanan publik, dengan pembagian pemerintah kabupaten/kota melaksanakan standar pelayanan minimal bidang sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti, dan pemerintah provinsi melaksanakan standar pelayanan minimal bidang sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di dalam panti.

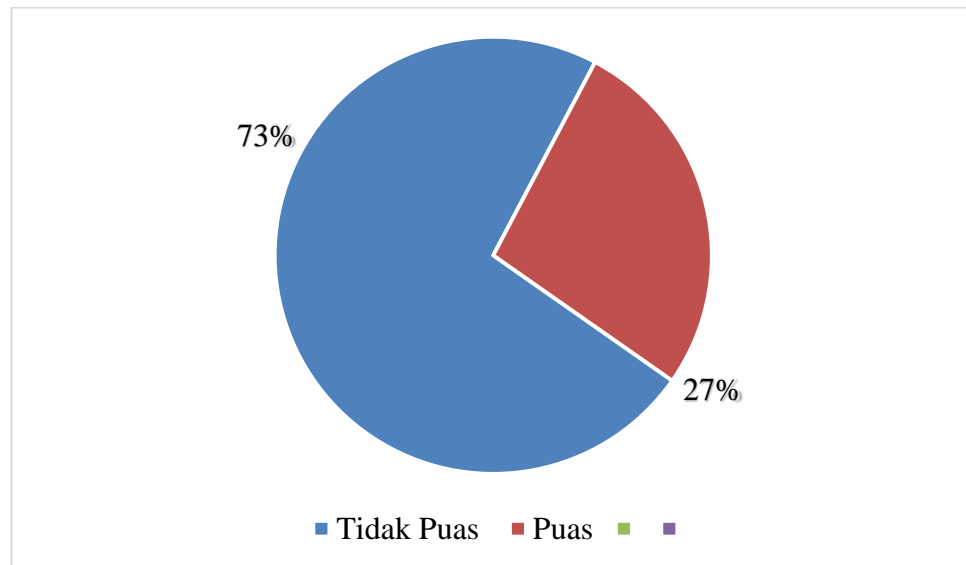
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mengamanahkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng untuk memberikan pelayanan sosial bagi tuna sosial di dalam panti. Pembinaan Sosial yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng dilaksanakan selama 6 bulan, yang terdiri dari pembinaan fisik/biologis, pembinaan psikologis, pembinaan sosial, dan pembinaan spiritual bagi penerima manfaat wanita tuna susila (WTS) yang dirujuk dari kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Penerima Manfaat yang dibina oleh Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng adalah wanita tuna susila berusia 13-45 tahun yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan dirujuk oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Jenis pelanggaran yang

dilakukan adalah perbuatan melanggar nilai, dan Norma kesusilaan di tempat umum.

Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menerima 100 (seratus) orang calon penerima manfaat setiap tahunnya. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Independen Universitas Hasanuddin, salah satu yang menyebabkan turunnya nilai indeks kepuasan masyarakat Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah kegiatan pembinaan yang monoton dan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan data yang bersumber dari studi dokumentasi peneliti pada UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng, penerima manfaat yang puas dengan kegiatan-kegiatan pembinaan hanya 27%, sedangkan 73% lainnya tidak puas dengan kegiatan pembinaan. Berikut ini merupakan diagram persentasi kepuasan penerima manfaat pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng:



Gambar 1.1 Persentase Kepuasan Penerima Manfaat Terhadap Pembinaan

Rendahnya kepuasan penerima manfaat UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan rapat evaluasi pelaksanaan layanan melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2022, rendahnya kepuasan penerima manfaat terhadap layanan yang diberikan disebabkan oleh:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan bagi penerima manfaat;
2. Perencanaan program yang kurang terstruktur, sehingga pelayanan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat;
3. Sumber daya manusia pada UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng yang terbatas, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang kurang optimal.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat pada UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya

Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kemudian ditapis menggunakan teknik tapisan isu APKL (aktual, problematik, khalayak dan layak), untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas dalam usaha penanganannya.

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis faktor penyebab rendahnya keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) *Mattiro Deceng* Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 1.1 Teknik Analisis Isu (APKL) dengan Rentang Penilaian 1-5

Faktor Penyebab	Aktual	Khalayak	Problematik	Layak	Jumlah Skor
perencanaan program kurang terstruktur	5	5	5	5	20
sarana dan prasarana yang kurang memadai	5	5	4	5	19
terbatasnya sumber daya manusia	3	3	4	3	13

Sumber: Asesmen kebutuhan melalui *focus group discussion* penelitian (2023)

Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan melalui *focus group discussion* (FGD) tentang faktor penyebab rendahnya keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat pada UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan teknik analisis isu APKL yang dilakukan oleh peneliti bersama informan, perencanaan program menjadi isu prioritas yang perlu segera diperbaiki untuk

meningkatkan kualitas layanan pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng.

Perencanaan sering kali diartikan sebagai sebuah proses manajemen yang serupa di semua bidang, padahal sebuah perencanaan di bidang kesejahteraan sosial tentunya membutuhkan sebuah model khusus dalam pelaksanaannya. Perencanaan program khususnya di bidang kesejahteraan sosial, mengalami beberapa kendala yang membuat program yang direncanakan kurang maksimal dan kurang dipahami secara komprehensif oleh pelaksana program.

Pada pelaksanaan Praktikum II profil manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan program Pascasarjana Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, peneliti yang juga praktikan pada saat itu menemukan permasalahan kebutuhan model perencanaan program pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ri Nawa Kota Makassar. Kebutuhan tersebut berdasar pada hasil asesmen yang dilakukan oleh praktikan bersama lembaga, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ri Nawa Kota Makassar yang juga merupakan salah satu pelaksana program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, mendapatkan kesulitan dalam menyusun program layanan dengan residen atau penerima manfaat yang beragam, sehingga membutuhkan sebuah model perencanaan yang dapat digunakan dan dipahami oleh seluruh elemen organisasi dalam menyusun sebuah program, dan selanjutnya menjadi standar penyusunan rencana program yang berkesinambungan.

Praktikum II profil manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, program Pascasarjana Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, menghasilkan

sebuah draf model perencanaan bernama Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas*). Model perencanaan ini seharusnya diujicobakan dan dikembangkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rii Nawa Kota Makassar, namun dikarenakan lembaga tersebut sudah tidak melaksanakan kegiatannya, peneliti mengujicobakan draf model perencanaan ini, pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Evaluasi uji coba pengembangan Model Perencanaan Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas Planning*) yang dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rii Nawa Kota Makassar, menunjukkan bahwa model perencanaan ini juga perlu diujicobakan pada lembaga milik pemerintah dan penerima manfaat lain. Sehingga, dapat lebih bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan sosial pada lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan. Adapun keuntungan dari perpindahan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Uji coba draf model bernama Perencanaan Kanvas Program Sosial dapat dilanjutkan karena institusi penerima wajib lapor (IPWL) Ri Nawa Kota Makassar sebagai lokasi praktikum sudah tidak beraktivitas;
2. Mendapat dukungan penuh dari pimpinan lokasi penelitian UPT Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng.

Keuntungan tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan penelitian yang berfokus pada uji coba Model Perencanaan Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas Planning*). Dukungan penuh dari pimpinan pada lokasi

penelitian, menjadi sebuah kekuatan untuk dapat memaksimalkan implementasi model ini dalam meningkatkan kebermanfaatannya bagi lingkungan.

Model ini merupakan modifikasi dari *Business Model Canvas (BMC)*. Model Perencanaan Kanvas Program Sosial mengandalkan penyusunan ide, cara kerja, *output* hingga biaya secara visualisasi rumusan konsep program dan kegiatan yang diinternalisasikan kepada nilai dan tujuan dari organisasi. Hal ini diharapkan memberikan dampak kepada Tim, agar setiap orang memiliki pemahaman yang sama terhadap perencanaan program.

Tabel kebaruan atau perbedaan antara *Business Model Canvas (BMC)* dan Perencanaan Kanvas Program Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Perbedaan BMC & Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas*)

<i>Bussiness Model Canvas (BMC)</i>	<i>Perencanaan Kanvas Program Sosial (Social Program Canvas Planning)</i>
1. Memiliki 8 kolom yang perlu diisi didalam kanvas;	1. Memiliki 11 kolom yang perlu diisi didalam kanvas;
2. Tidak ada kolom legalitas / dasar hukum;	2. Terdapat kolom hukum sebagai dasar pelaksanaan program;
3. Tidak ada kolom potensi dalam kanvas;	3. Terdapat kolom potensi dalam penyusunan rencana;
4. Terdapat kolom <i>revenue</i> ;	4. Tidak ada kolom <i>revenue</i> ;
5. Kolom mitra kunci ;	5. Kolom penerima manfaat;
6. Kolom aktivitas kunci.	6. Kolom implementasi program.

Sumber: Laporan Praktikum II Pascasarjana Poltekesos Bandung 2022

Model Perencanaan Kanvas Program Sosial merupakan sebuah model dalam strategi pengembangan dan perencanaan untuk menerjemahkan konsep/ide, pelayanan bagi penerima manfaat, infrastruktur maupun sumber-sumber dalam bentuk elemen-elemen visual. Model Perencanaan Kanvas Program Sosial mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman

yang serupa dan nyata terhadap program yang dilakukan, melalui metode kerja, *output*, biaya dan sebagainya.

Model Perencanaan Kanvas Program Sosial digunakan dengan metode diskusi antara seluruh elemen lembaga. Poin-poin yang menjadi konsep/ide/gagasan/usulan kemudian dituliskan dalam *metacard/sticky notes* dan ditempelkan pada kanvas. Fasilitator dan peserta dapat memulainya dari kolom mana saja, tergantung dari kolom mana yang sudah terlebih dahulu terisi, dapat diawali dari potensi awal mana saja yang sudah dimiliki oleh lembaga. Selanjutnya para peserta berdiskusi menyepakati mana-mana saja yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Model ini berisi sebelas blok/kolom yang harus diisi oleh Tim, blok/kolom tersebut terdiri dari:

1. Blok legalitas & dasar hukum (*legality*), merupakan sebuah dasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dilakukan;
2. Blok penerima manfaat (*beneficiaries*), menggambarkan individu, kelompok, masyarakat yang menjadi target yang akan dijangkau
3. Blok tahapan pelaksanaan (*implementation*) yaitu aktivitas utama yang terkait dengan kegiatan;
4. Blok nilai, tujuan dan manfaat program (*values*), merupakan hal yang berharga, yang dapat dimaknai sebagai ruh dalam pelaksanaan program;
5. Kolom hubungan dengan penerima manfaat (*relation*) yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menjangkau dan membangun hubungan dengan *beneficiaries*;

6. Kolom potensi penerima manfaat (*potency*) adalah sumber daya utama yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan program;
7. Kolom mitra dan sumber (*source*), yaitu mitra kerja dan sumber lainnya yang dapat dimanfaatkan;
8. Kolom struktur biaya / kebutuhan (*cost*), yaitu biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mendukung semua aktivitas-aktivitas dalam program;
9. Kolom pendanaan (*funding*), yang berisi tentang sumber pendanaan;
10. Kolom dampak negatif yang berkurang (*negative impact*), yaitu masalah apa yang akan hilang/berkurang setelah pelaksanaan kegiatan/program;
11. Kolom dampak positif yang bertambah (*positive impact*), yaitu budaya/kebiasaan positif apa yang akan meningkat setelah program/kegiatan dilakukan.

Beberapa kelebihan Perencanaan Kanvas Program Sosial adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang relatif terjangkau, hanya membutuhkan kertas plano yang dijadikan kanvas, alat tulis, dan *sticky notes*;
2. Terdapat kolom legalitas sebagai penjelasan dari sumber hukum pelaksanaan kegiatan;
3. Mayoritas pernah mendengar *Business Model Canvas (BMC)* sehingga akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan;
4. Alat atau teknik yang dapat menyusun program dengan komprehensif, karena berkaitan erat dengan nilai-nilai organisasi, penjabaran visi misi,

serta kolom dampak positif yang bertambah dan dampak negatif yang berkurang.

Netting (2012) Menyatakan bahwa “Pekerja sosial tidak hanya dipanggil untuk menjadi praktisi langsung, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan terutama dalam situasi untuk memperjuangkan kepentingan penerima layanan.” Pentingnya memahami kondisi, masalah, kebutuhan dan kesempatan yang digali berdasarkan pengetahuan profesional sehingga dapat menyediakan dasar untuk merencanakan praktik, termasuk pengembangan organisasi, sehingga draf model perencanaan yang dikembangkan tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan lokasi penelitian yang bersumber dari asesmen kebutuhan.

Model Perencanaan Kanvas Program Sosial sebagai sebuah rekayasa teknologi dalam manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, membutuhkan pembuktian secara empiris untuk dapat menghasilkan sebuah model perencanaan yang *final*. Pembuktian secara empiris sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan melalui proses penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah “Bagaimana model perencanaan Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas Planning*) pada Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan?.” Rumusan masalah utama tersebut kemudian dirinci menjadi sub-sub rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan pengembangan Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana draf Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana implementasi Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Bagaimana evaluasi Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?
5. Bagaimana model akhir Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah penelitian yaitu menghasilkan gambaran model perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan utama tersebut kemudian dirinci menjadi sub-sub tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Dihasilkannya gambaran kebutuhan pengembangan Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dihasilkannya draf Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Terlaksananya implementasi Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Diketuinya hasil evaluasi Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Dihasilkannya model akhir Model Perencanaan Kanvas Program Sosial pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara manfaat teoritis, maupun manfaat praktis. Secara lebih rinci manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah alternatif model perencanaan yang dapat menambah teori pada ilmu kesejahteraan sosial / pekerjaan sosial, khususnya pada manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Klien/Penerima Manfaat, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan bagi klien/penerima manfaat pada PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bagi Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) Mattiro Deceng, secara praktis, dapat dimanfaatkan dalam menyusun sebuah perencanaan program yang komprehensif dan dapat meningkatkan keberhasilan layanan.

- c. Bagi Pemerintah, secara praktis, dapat dimanfaatkan dalam menyusun sebuah perencanaan program yang komprehensif dalam melaksanakan standar pelayanan minimal bidang sosial di dalam panti.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini disesuaikan dengan pedoman penulisan Tesis Magister Terapan Pekerjaan Sosial Poltekesos Bandung, yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan, Pada bab ini laporan penelitian memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematikan penelitian.
2. Bab II Tinjauan Teoritik dan Kerangka Pikir Penelitian, Bab ini membahas mengenai beberapa uraian singkat hasil-hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teoritik yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau penulis yang berhubungan dengan topik penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, definisi operasional/penjelasan istilah, populasi dan teknik penarikan sample/sumber data instrumen, Uji validitas dan reliabilitas alat ukur/pemeriksaan keabsahan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

5. Bab V Implikasi Hasil Penelitian, Bab ini membahas tentang implikasi penelitian secara komprehensif terhadap lokasi penelitian, dalam hal ini UPT PPSKW Mattiro Deceng.
6. Bab VI Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

